

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Pengelolaan Pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah

Dewa Ayu Radela⁽¹⁾

Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾

I Made Endra Lesmana Putra⁽³⁾

(1)(2)(3)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: radelaayu@gmail.com

ABSTRACT

The importance of accountability and transparency in public sector financial management, particularly in tourist attractions that contribute significantly to the regional economy. The purpose of this study was to analyze the accountability and transparency practices in revenue management at the Goa Gajah tourist attraction in Gianyar. This study used a qualitative approach with a descriptive method through a case study, involving interviews, observations, and documentation with managers, village officials, and beneficiary communities. The results showed that accountability has been realized through daily recording of revenue and the number of visits submitted to the Gianyar Regency Tourism Office, accompanied by a revenue sharing mechanism of 60% for the office and 40% for the Bedulu Traditional Village. Community participation occurs in the form of economic roles, such as traders and tour guides, as well as the receipt of revenue information through annual village meetings. Transparency is expressed in the timely delivery of revenue data, clear, accurate, and accessible, although details of fund use are not always disclosed openly and require special requests. In conclusion, revenue management at Goa Gajah has met the principles of accountability and transparency in general, but needs to be improved in the detailed reporting of fund use. The implication is that this practice can be a model for the management of other tourist attractions in building public trust and ensuring that there is no good governance-based management.

Keywords: *accountability, transparency, tourism attraction revenue management.*

PENDAHULUAN

Kegiatan bidang pariwisata telah dianggap menjadi sangat bernilai penting bagi suatu negara, sebab dari hasil kegiatan ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan dan juga sekaligus pertumbuhan ekonomi. Bali telah dikenal sebagai bagian salah satu tujuan bagi para wisatawan baik mancanegara maupun lokal untuk menjadi daerah wisata yang hendak dikunjungi di kawasan Indonesia, dimana Pulau Bali telah menjadi tempat yang kian banyak peminatnya. Dalam daerah wisata, maka akan adanya ditemukan objek wisata yang keberadaannya ini dinilai sebagai kawasan yang wajib dijaga, sehingga adanya badan usaha yang secara langsung dilakukan pengelolaan oleh pihak desa bersama dengan melakukan bentuk

kerjasama dengan pihak dinas yang terkait secara langsung untuk membantu dan juga memberikan keterlibatannya secara langsung mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi lokal dengan cara melakukan berbagai macam usaha atau upaya berupa pemanfaatan sejumlah kekayaan alam dan budaya serta juga kearifan lokal yang sudah tersedia. Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa pengelolaan ekonomi telah mengacu pada sejumlah perolehan pendapatan yang besar, maka sangat wajib untuk memperhatikan prinsip akuntabilitas dan juga sekaligus transparansi dalam melakukan aktivitas pengelolaan laporan keuangan, dimana aktivitas ini dinilai sebagai bagian faktor kunci atas kesuksesan atau keberhasilan yang dicapai pada saat melakukan proses pengelolaan sejumlah hasil berupa pendapatan yang secara langsung telah adanya dukungan atas keterlibatan secara aktif dari beberapa pihak yang posisinya sedang adanya kepentingan.

Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa prinsip dari akuntabilitas dan juga sekaligus transparansi telah menjadi aspek yang wajib diperhatikan, sebab perannya yang kian penting dalam membantu melancarkan proses pengelolaan keuangan dengan memperoleh hasil yang secara baik, benar dan sehat serta juga hasil ini mampu secara berkelanjutan. Dijelaskan bahwa suatu organisasi atau perusahaan akan melakukan penerapan akuntabilitas dan juga sekaligus transparansi dalam serangkaian proses pengelolaan keuangannya, maka hal ini bermaksud agar mempunyai mewujudkan tata kelola yang secara baik atau hal ini disebut sebagai *Good Corporate/Public Governance*, dimana apa yang telah dibuat dan juga dihasilkan serta juga dilaporkan mampu dibuktikan serta dipertanggung jawabkan kedepannya bagi para pihak yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan operasional perusahaan.

Dalam kondisi saat ini, maka diketahui bahwa organisasi yang bergerak dalam bidang sektor publik begitu sangat sering dinilai sebagai organisasi yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan tanpa mencari keuntungan atau laba atau kegiatan usaha ini disebut non-profit (Setiadi, 2021). Begitu banyak yang memiliki penilaian bahwa organisasi yang melakukan kegiatan di sektor publik sudah dipastikan sebagai kegiatan usaha *non-profit*. Penilaian atau cara pandang ini telah dinilai kurang mampu tepat, sebab organisasi yang melakukan kegiatan di bidang sektor publik ada yang memiliki tipe sebagai *quasi non-profit*. Sumber atas sejumlah pendanaan dari organisasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang sektor publik pada tipe *quasi non-profit*, maka diketahui telah bersumber dari para pihak investor pemerintah, pihak investor swasta dan lembaga keuangan serta dana ini juga diperoleh melalui pinjaman dari pihak kreditor. Dengan sebab inilah, maka organisasi yang mendapatkan sejumlah dana dari para pihak eksternal akan memiliki kewajiban yang besar untuk kedepannya menunjukkan sikapnya untuk bertanggung jawab kepada pihak yang telah memberikan sejumlah dana tersebut.

Corporate governance atau disebut sebagai tata kelola perusahaan, maka telah dijelaskan sebagai sistem atau cara yang dipergunakan untuk membantu dalam memberikan pengarahan dan juga dipakai membantu untuk mengendalikan serta juga membantu dalam melakukan pengawasan atas aktivitas pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi dengan pelaksanaannya secara efisien (Sarwoko, 2016). Dengan demikian tata kelola ini menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membantu dalam mengatur atas jalinan atau hubungan yang terjadi antara pihak *stakeholder* guna membantu dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan juga sekaligus akuntabilitas perusahaan. Baik oraganisasi swasta, organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan semuanya dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG guna membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja dan kontribusi berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Objek Wisata Goa Gajah

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Pendapatan
2020	67.200 orang	Rp 5.376.000.000
2021	17.920 orang	Rp 1.402.600.000
2022	43.000 orang	Rp 3.456.000.000
2023	93.600 orang	Rp 7.488.000.000
2024	111.240 orang	Rp 8.899.200.000
Total	332.960 orang	Rp 26.621.800.000

Sumber : Pengelola Objek Wisata Goa Gajah, 2025

Sebagai organisasi sektor publik, Pengelola Objek Wisata tentu diharapkan telah mempraktikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dijelaskan bahwa objek dari riser ini yakni kelompok yang menjadi pihak Pengelola Objek Wisata Goa Gajah yang keberadaannya ini dijumpai secara tepat ada di Banjar Gua, Desa Bedulu, Blahbatuh Gianyar. Merujuk pada data Tabel 1, maka dijelaskan hasil atas pelaksanaan observasi yang telah menunjukkan data pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bahwa objek ini telah dinilai mengalami peningkatan atas sejumlah pengunjung yang dialami dalam kondisi pasca wabah covid ditahun sebelumnya, hingga kini 2024 Objek Wisata Goa Gajah sangat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan (Pengelola Objek Wisata Goa Gajah, 2025). Kondisi ini, maka dengan secara otomatis memberikan penilaian bahwa Objek Wisata Goa Gajah telah berhasil memancarkan pesona atau daya tarik yang secara kuat kepada para wisatawan, sehingga hal ini membuat tiap tahun mengalami kondisi *trend* peningkatan kunjungan oleh wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang cukup signifikan.

Transaparansi adalah keharusan dalam pengelolaan dana yang besar, hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban pengelola kepada masyarakat desa yang memberikan mandat. Dalam kegiatan pengelolaan pada Objek Wisata Goa Gajah, maka telah adanya berlangsung bentuk kerjasama yang terjalin antara pihak Dinas Pariwisata Kab. Gianyar dengan pihak Desa Adat Bedulu yang dalam kerjasama ini membahas poin penting atas sejumlah pembagian hasil yang akan didapatkan atas pengelolaan objek ini, dimana dengan perolehan angka sebesar 60% telah menjadi hak yang diperoleh bagi Dinas Pariwisata dan untuk pembagian 40% akan menjadi hak yang diterima oleh pihak Desa Adat dari sejumlah pendapatan dari objek ini. Dalam teori (Mardiasmo, 2009) yang disampaikan melalui jurnal (Roni Hidayat, 2023) mengemukakan bahwa para pihak sebagai pengelola memiliki kewajiban selanjutnya untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban dengan menyajikan dan melaporkan serta juga dengan melakukan pengungkapan atas semua yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pendapatan yang diraih oleh Objek Wisata Goa Gajah yakni didapatkan secara langsung dari kegiatan melakukan penjualan tiket. Sejumlah pendapatan dari melakukan kegiatan penjualan tiket tersebut, maka diketahui bahwa per harinya akan dibuatkan dalam bentuk kwitansi yang selanjutnya dijadikan sebagai laporan lalu disetor ke dinas. Berkaitan dengan alokasi dana 40% dari pendapatan objek wisata Goa Gajah untuk Desa Adat Bedulu proses yang ditempuh untuk mencairkan dana tersebut ialah Desa Adat akan mengajukan surat permohonan pencarian dana kepada pihak dinas. Proses pengajuan ini, maka selanjutnya dilakukan dengan sistem yang secara berkala yaitu setiap tiga bulan sekali, setelah disetujui dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening Desa Adat. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, Desa Adat akan menerima kwitansi sebagai bukti penerimaan dana dan laporan kunjungan wisatawan sebagai informasi tambahan terkait pengelolaan Objek Wisata Goa Gajah. Dari pendapatan 40% tersebut akan disampaikan kepada masyarakat desa adat melalui pesangkepan atau musyawarah desa yang diadakan setahun sekali pada rapat akhir tahun.

Untuk mengetahui bagaimana pendapatan tersebut dikelola, penelitian lebih mendalam perlu dilakukan berdasarkan temuan yang mengindikasikan adanya hal yang perlu dieksplorasi lebih lanjut terkait pengelolaan pendapatan. Sesuai dengan hasil peneliti terdahulu oleh (Kumalasari, 2016) mengatakan bahwa praktek akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting untuk memberikan pertanggungjawaban publik. Fenomena kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan Desa Adat Bedulu juga menunjukkan model tata kelola berbasis kearifan lokal yang unik, namun masih menghadapi tantangan transparansi karena

Urgensi dari pelaksanaan riset ini, maka secara langsung telah diperkuat dan didukung juga dengan minimnya pelaksanaan riset sebelumnya yang telah mengangkat topik berkaitan dengan akuntabilitas dan juga transparansi atas proses pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan langsung pada objek wisata. Merujuk pada fenomena yang ditemukan dan juga masalah yang terjadi, maka hal ini membuat pihak peneliti mengangkat judul yakni **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Pengelolaan Pendapatan Di Objek Wisata Goa Gajah”**

Akuntabilitas

Transparansi

206 | Hita_Akuntansi dan Keuangan

Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan adalah bagian dari pengelolaan keuangan yang secara khusus berfokus pada strategi dan taktik untuk memaksimalkan pemasukan atau pendapatan melibatkan identifikasi, perolehan dan optimasi sumber-sumber pendapatan. Dijelaskan bahwa suatu organisasi atau perusahaan akan melakukan penerapan akuntabilitas dan juga sekaligus transparansi dalam serangkaian proses pengelolaan keuangannya, maka hal ini bermaksud agar mempunyai mewujudkan tata kelola yang secara baik atau hal ini disebut sebagai *Good Corporate/Public Governance*, dimana apa yang telah dibuat dan juga dihasilkan serta juga dilaporkan mampu dibuktikan serta dipertanggung jawabkan kedepannya bagi para pihak yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan operasional perusahaan.

Organisasi Sektor Publik Tipe *Quasi Non-profit*

Dijelaskan bahwa organisasi yang melakukan kegiatan sektor publik dengan tipe *quasi non-profit*, maka telah dinilai sebagai organisasi yang melakukan kegiatan beroperasi di kawasan wilayah antar sektor publik (pemerintah) dan sektor non-profit (nirlaba) yang memiliki tujuan untuk menyediakan layanan publik serta memiliki tujuan untuk mendapatkan surplus atau keuntungan (Andre, 2006). Objek wisata Goa Gajah merupakan contoh organisasi sektor publik tipe *quasi non-profit*, situs bersejarah Goa Gajah meskipun dikelola oleh pemerintah daerah juga melibatkan unsur masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Hasil dari penjualan tiket sebagian digunakan untuk membangun fasilitas dan pelestarian situs itu menunjukkan adanya tujuan untuk mendapatkan surplus untuk operasional berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Riset yang dilakukan kali ini, maka telah mempergunakan jenis penelitian kualitatif dengan sistem metode analisis deskriptif serta juga menerapkan pendekatan studi kasus dalam serangkaian proses tahapan risetnya. Pendekatan ini dipilih sebab pihak peneliti hendak memperoleh pemahaman yang lebih banyak terkait mengenai penerapan secara nyata prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mendukung kelancaran pengelolaan sejumlah pendapatan yang telah dihasilkan oleh Objek wisata Goa Gajah. Sebagai organisasi sektor publik, Pengelola Objek Wisata tentu diharapkan telah mempraktikkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dijelaskan bahwa objek dari riser ini yakni kelompok yang menjadi pihak Pengelola Objek Wisata Goa Gajah yang keberadaannya ini dijumpai secara tepat ada di Banjar Gua, Desa Bedulu, Blahbatuh Gianyar. Merujuk pada data Tabel 1, maka dijelaskan hasil atas pelaksanaan observasi yang telah

menunjukkan data pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bahwa objek ini telah dinilai mengalami peningkatan atas sejumlah pengunjung yang dialami dalam kondisi pasca wabah covid ditahun sebelumnya, hingga kini 2024 Objek Wisata Goa Gajah sangat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan (Pengelola Objek Wisata Goa Gajah, 2025).

Objek dalam pelaksanaan riset ini yakni para informan yang dengan secara langsung terbukti menunjukkan keterlibatan dan partisipasinya secara langsung dalam melakukan proses pengelolaan pelaporan atas sejumlah pendapatan yang dihasilkan oleh Objek Wisata Goa Gajah. Data yang dipakai memberikan dukungan atas hasil temuan ini telah mencakup atas data primer dan data sekunder. Teknik yang dipilih dalam membantu mencari dan juga sekaligus mengumpulkan data yakni melaksanakan observasi lapangan, wawancara dan juga mencakup proses dokumentasi. Selanjutnya data-data yang didapatkan ini akan dilanjutkan ke tahapan untuk dianalisis dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan riset ini, maka untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mengikuti pendekatan induktif. Dengan kata lain, kesimpulan ditarik dengan mengembangkan teori yang bersumber langsung dari data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data-data yang diperoleh dari pengelola objek wisata goa gajah dianalisis dengan teori akuntabilitas yang menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal (Trimurti, 2021), menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui indikator yaitu akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara di dapat penjelasan unsur-unsur akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabel

Dalam pengelolaan pendapatan, menunjukkan tanggung jawab penuh atas semua tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap standar serta regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah dicatat berdasarkan pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan selanjutnya akan disetorkan ke pengelola keuangan yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak I Ketut Wijaya sebagai Pengelola Objek Wisata Goa Gajah :

“Terkait dengan akuntabilitas kami disini melakukan pencatatan sesuai dengan petunjuk dari dinas dan kami setiap harinya akan menyetorkan jumlah pendapatan berupa uang fisik dan catatan kunjungan yang ditulis manual dan printout melalui mesin tiket sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pengelola di Objek Wisata Goa Gajah”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelola Objek Wisata Goa Gajah menunjukkan akuntabilitas dengan melaksanakan pencatatan harian sesuai arahan dari dinas terkait. Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada dua aspek utama: pencatatan dan penyetoran. Setiap hari, pengelola mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket. Proses pencatatan ini dilakukan secara sistematis mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh dinas. Hasil dari pencatatan ini kemudian dilaporkan dengan menyetorkan uang fisik dan menyerahkan catatan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan menyerahkan catatan dan uang fisik secara langsung kepada dinas, pengelola Objek Wisata Goa Gajah memastikan transparansi dan keabsahan laporan keuangan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola operasional di lapangan. Melalui mekanisme ini, pengelola tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga membangun kepercayaan dengan dinas bahwa mereka telah mengelola pendapatan dengan jujur dan sesuai prosedur.

2. Parisipatif

Melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dan *stakeholder* lain, dalam pengambilan keputusan maupun evaluasi proses, sehingga tercipta kepercayaan bersama, rasa kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti Bapak I Ketut Wijaya sebagai pengelola objek wisata menyampaikan bahwa :

“Dalam hal memberikan saran untuk pengelolaan pendapatan kemungkinan tidak karena ini seluruhnya dikelola dinas. Masyarakat paritisipasinya hanya sebagai pedagang, pemandu wisatawan atau penjaga tiket seperti ini”.

Berdasarkan penyampaian tersebut dijelaskan bahwa dalam konteks pengelolaan pendapatan, masyarakat tidak memiliki peran langsung dalam mengambil keputusan atau mengelola dana. Tanggung jawab penuh atas pengelolaan pendapatan, termasuk perencanaan anggaran, alokasi dana, dan pelaksanaannya, sepenuhnya berada di tangan dinas pariwisata kabupaten Gianyar. Oleh karena itu, jika ada usulan atau saran mengenai pengelolaan pendapatan, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikannya secara langsung kepada dinas. Sebaliknya, peran masyarakat hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat operasional dan mendukung, bukan pengelolaan keuangan. Mereka dapat berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi di area tersebut, seperti: pedagang, pemandu wisatawan dan penjaga tiket. Jadi, masyarakat terlibat

dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan, tetapi tidak terlibat dalam bagaimana pendapatan tersebut dikelola atau didistribusikan.

Partifipatif dalam pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa gajah dalam hal keterlibatan masyarakat penerimaan dan pemanfaatan pendapatan tersebut. hal tersebut disampaikan oleh Bendesa Adat Bedulu Bapak I Gusti Ngurah Susatya Putra :

"Dari pendapatan tersebut akan disampaikan melalui pesangkepan saat rapat akhir tahun di desa"

Sedangkan terkait pertanggungjawaban hasil pembagian pendapatan, pengelola Objek Wisata Goa Gajah Bapak I Ketut Wijaya menyampaikan bahwa :

"Dari pembagian pendapatan itu akan dipakai oleh pengempon pura Goa gajah sebagai dana saat piodalan berlangsung, untuk menata kawasan objek wisata dan kebersihan Objek Wisata Goa Gajah"

Dari kutipan wawancara diatas, akuntabel dan partisipatif dalam hal pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah sudah sesuai karena sudah dilakukan oleh pengelola objek wisata, dinas pariwisata kabupaten Gianyar dan masyarakat desa adat bedulu untuk mengelola pendapatan objek wisata tersebut.

Transparansi pengelolaan pendapatan Objek Wisata Goa Gajah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data-data yang diperoleh dari pengelola objek wisata goa gajah dianalisis dengan teori akuntabilitas yang menurut (Trimurti, 2021), menyatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui indikator yaitu informatif : tepat waktu, jelas, akurat, mudah diakses. Selanjutnya yaitu pengungkapan : kondisi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, didapat penjelasan indikator transparansi sebagai berikut :

1. Informatif

Informatif meliputi : tepat waktu, jelas, akurat, dan mudah diakses. Untuk menjadi informatif, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat agar datanya dapat dipertanggungjawabkan, serta disajikan dengan jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penyajian pengelolaan pendapatan yang tepat waktu sangat penting untuk menyediakan dasar yang kuat sehingga keputusan tidak lama tertunda. Dalam hal ini bendesa adat bedulu Bapak I Gusti Ngurah Susatya Putra menyampaikan bahwa :

"Untuk objek wisata yang dikelola dinas pariwisata, datanya sudah pasti akurat dan pengelolaannya selalu tepat waktu, untuk penyampaian pendapatan objek wisata ke masyarakat melalui pesangkepan yang selalu di sampaikan saat rapat akhir tahun Desa Adat".

Pengelola Objek Wisata Goa Gajah Bapak I Ketut Wijaya juga mengatakan bahwa :

“selalu tepat waktu karena objek wisata goa gajah dikelola oleh dinas. Untuk ke masyarakat biasanya desa adat melakukan pesangkepan untuk menyampaikan pendapatan itu”

Bapak I Wayan Suta juga sebagai masyarakat Desa Adat Bedulu juga mengatakan bahwa :

“Benar, pendapatan objek wisata goa gajah disampaikan pada saat rapat akhir tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal kemudahan untuk masyarakat mengakses pengelolaan pendapatan Objek Wisata Goa Gajah, bapak I Gusti Ngurah Susatya Putra sebagai Bendesa Desa Bedulu mengatakan bahwa :

“Kalau soal akses informasi, kami di desa adat setiap akhir tahun, akan mengadakan rapat desa untuk mengumumkan total pendapatan objek wisata Goa Gajah”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak I Wayan Suta masyarakat Desa Adat Bedulu :

“Hanya total pendapatan objek wisata goa gajah saja yang disampaikan oleh pengurus saat pesangkepan di desa adat dan tidak rinci, maksudnya rincian dari pendapatan itu tidak disampaikan”

Dari kutipan wawancara diatas informatif dalam pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah sudah sesuai, di mana Dinas Pariwisata bersama pengelola objek wisata Goa Gajah dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan seluruh data pendapatan dikelola dengan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan secara jelas dan mudah diakses.

2. Pengungkapan

Pengungkapan dalam hal ini mencakup kondisi keuangan dalam pengelolaan pendapatan secara utuh, sehingga dapat memberikan gambaran tentang proses pengelolaan pendapatan. Pengelola Objek Wisata Goa Gajah Bapak I Ketut Wijaya menyampaikan bahwa :

“Pendapatan utama disini melalui penjualan tiket dari hasil pendapatan tersebut diserahkan dan dikelola oleh dinas pariwisata kabupaten Gianyar lalu dari pendapatan tersebut akan dibagi dua untuk dinas pariwisata 60% dan untuk desa adat 40%”.

Kondisi keuangan dalam hal pengelolaan pendapatan adalah gambaran utuh mengenai sumber pendapatan dan pengelolaannya. Hal ini mengacu pada laporan yang disampaikan oleh pihak pengelola, seperti dinas pariwisata atau pengelola objek wisata, kepada pihak-pihak terkait. Bapak I Gusti Ngurah Susatya sebagai Bendesa Adat Bedulu mengatakan bahwa :

“Ada laporannya, laporan hasil pendapatan dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang”

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Kita tidak diberikan laporan, hanya saja untuk pendapatan 40% tersebut biasanya desa adat yang mengajukan untuk dicairkan dengan melampirkan laporan pengajuan pencairan pendapatan

yang berisi jumlah pengunjung ke objek wisata goa gajah dan total pendapatan per tiga bulannya berdasarkan catatan yang kita miliki. Dari pendapatan tersebut desa adat mendapatkan 40% , dikairkannya juga setiap tiga bulan”

Terkait kondisi keuangan dalam hal pengelolaan pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar hanya menyajikan laporan pendapatan dari kunjungan wisatawan, sementara pembagian pendapatan sebesar 40% tidak dilaporkan. Pihak desa adat harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mencairkan dana tersebut.

Berdasarkan wawancara, pengelolaan pendapatan di objek wisata Goa Gajah sudah sesuai. Hal ini terlihat dari adanya sistem pembagian pendapatan yang jelas dan disepakati, yaitu 60% untuk dinas pariwisata dan 40% untuk desa adat.

Pembahasan hasil penelitian

Akuntabilitas Tentang Pengelolaan Pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah

Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa pengelolaan ekonomi telah mengacu pada sejumlah perolehan pendapatan yang besar, maka sangat wajib untuk memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam melakukan aktivitas pengelolaan laporan keuangan, dimana aktivitas ini dinilai sebagai bagian faktor kunci atas kesuksesan atau keberhasilan yang dicapai pada saat melakukan proses pengelolaan. Berdasarkan hasil penelitian didapat indikator-indikator akuntabilitas menurut mardiasmo (2009) dalam jurnal (Trimurti, 2021) yaitu :

1. Akuntabel

Pada pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah akuntabel dalam hal ini adalah tanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dan keputusan yang diambil, didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap standar serta regulasi yang berlaku dan bertanggungjawab oleh pihak pengelola dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan yang berlaku mulai dari proses pencatatan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pengelolaan pendapatan Objek Wisata Goa Gajah dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaannya sudah baik. Dimana adanya pencatatan yang dilakukan oleh pengelola Objek Wisata Goa Gajah, pencatatan tersebut berupa catatan tertulis yang didalamnya terdapat catatan harian jumlah kunjungan dan jumlah pendapatan harian kunjungan di Objek Wisata Goa Gajah. Selanjutnya pihak pengelola Objek Wisata Goa Gajah akan menyetorkan catatan tersebut berupa laporan harian pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah ke

Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang selanjutnya akan diselesaikan dengan sistem yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.

2. Partisipatif

Partisipatif dimana hal ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dan *stakeholder* lain, dalam pengambilan keputusan maupun evaluasi proses, dan menyuarakan aspirasi, dalam pengelolaan pendapatan Objek Wisata Goa Gajah segala bentuk pengelolaan pendapatan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang menjadikan hal tersebut tidak berkemungkinan melibatkan masyarakat. Dalam hal lain partisipasi masyarakat sebagai penggerak ekonomi di lapangan yakni sebagai pedagang, pengelola tiket dan pemandu wisatawan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Isna Apriliana, 2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa memberikan dampak baik terhadap kepercayaan masyarakat.

Transparansi Tentang Pengelolaan Pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah

Transparansi dalam pengelolaan keuangan, maka wajib untuk selalu dilakukan, maka telah dijelaskan sebagai sistem atau cara yang dipergunakan untuk membantu dalam memberikan pengarahan dan juga dipakai membantu untuk mengendalikan serta juga membantu dalam melakukan pengawasan atas aktivitas pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi dengan pelaksanaannya secara efisien (Sarwoko, 2016). Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa pengelolaan ekonomi telah mengacu pada sejumlah perolehan pendapatan yang besar, maka sangat wajib untuk memperhatikan transparansi dalam melakukan aktivitas pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian didapat indikator-indikator transparansi menurut mardiasmo (2009) dalam jurnal (Trimurti, 2021) yaitu :

1. Informatif

Informatif dalam hal ini meliputi tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diakses dimana hal tersebut satu kesatuan. Tepat waktu merupakan informasi yang disampaikan pada saat dibutuhkan agar relevan dan berguna, jelas merujuk pada penyampaian yang lugas, akurat ialah keharusan yang mutlak dan valid selanjutnya mudah diakses dimana memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Pada pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah informatif dalam ini sudah baik. Adanya kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar sebagai pengelola pendapatan merupakan hal yang sangat baik dalam pengelolaan pendapatan yang besar di Objek Wisata Goa Gajah guna mencegah kecurangan ataupun kecurigaan di

dalamnya. Pengelolaan di Objek Wisata Goa Gajah dalam hal ini laporan pendapatan disampaikan pada saat pesangkepan yang dilaksanakan setiap rapat akhir tahun, dalam pesangkepan tersebut akan disampaikan jumlah atau total pendapatan Objek Wisata Goa Gajah.

2. Pengungkapan

Pengungkapan yang dimaksud dalam hal ini ialah kondisi keuangan. Kondisi keuangan merujuk pada gambaran mengenai kondisi pengelolaan pendapatan pada Objek Wisata Goa Gajah. Pendapatan terbesar dari Objek Wisata Goa Gajah yaitu melalui tiket masuk wisatawan yang berkunjung, pengelola tiket masuk akan mencatat jumlah kunjungan dan jumlah pendapatan perhari lalu disetorkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, segala bentuk pengelolaan pendapatan dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Pendapatan tersebut akan dibagi menjadi dua yakni sebesar 40% untuk Desa Adat dan 60% untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Dari pendapatan tersebut terkait kondisi keuangan dalam hal pengelolaan pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar hanya menyajikan laporan pendapatan dari kunjungan wisatawan, sementara pembagian pendapatan sebesar 40% tidak dilaporkan. Pihak desa adat harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mencairkan dana tersebut.

Hasil temuan ini diperkuat oleh temuan (Azizah, 2022) bahwa transparansi atas pengelolaan dana desa, maka titik fokusnya merujuk pada pemberdayaan dan juga sekaligus pada kesejahteraan masyarakat, dimana transparansi memberikan dampak keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan dengan anggaran yang memberikan hasil output kemakmuran masyarakat Desa. Hasil temuan oleh (Mario Sanda, 2022) juga memberikan ungkapan bahwa transparansi telah menjadi aspek yang wajib diperhatikan sebab perannya yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, dimana memberikan dukungan atas adanya tata kelola secara benar dan jujur.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah, dapat disimpulkan bahwa mengenai akuntabilitas di dalam pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah ditunjukkan dengan pencatatan laporan harian hasil pendapatan yang selanjutnya akan disetorkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar sebagai pihak pengelola keuangan yang nantinya laporan tersebut akan diselesaikan oleh dinas terkait melalui sistem yang mereka gunakan, proses tersebut memastikan tidak ada selisih antara laporan yang dibuat oleh pengelola Objek Wisata Goa Gajah dengan data yang tercatat di Dinas Pariwisata, sehingga pengelolaan pendapatan menjadi transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan di Objek Wisata Goa Gajah ditunjukkan melalui penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat melalui pesangkepan atau musyawarah Desa yang dilaksanakan saat rapat akhir tahun dengan menyampaikan jumlah pendapatannya saja, namun jika ada masyarakat yang ingin mengetahui rinciannya pengurus desa senantiasa memberikan informasi terkait dengan pengelolaan pendapatannya. Sistem ini tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan yang jujur, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam keberlanjutan Objek Wisata Goa Gajah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pengelola Objek Wisata Goa Gajah yaitu agar pencatatan laporan harian pendapatan tetap dipertahankan dan ditingkatkan akurasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga penting dilakukan agar proses pencatatan, pelaporan, hingga pembagian hasil dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan, sebaiknya penyampaian informasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan pada rapat akhir tahun, tetapi juga secara berkala, misalnya per triwulan. Penggunaan media informasi, seperti papan pengumuman di area wisata atau platform digital desa, juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Dengan cara ini, prinsip transparansi akan semakin kuat, kepercayaan masyarakat akan meningkat, serta partisipasi mereka dalam menjaga keberlanjutan Objek Wisata Goa Gajah akan semakin optimal.

Daftar Pustaka

- Augina, A., Program, M., Ilmu, S., Masyarakat, K., Kedokteran, F., Kesehatan, I., Jambi, U., Letjend, J., No, S., 33, T., & Pura, J. (n.d.). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 12).
- Azizah, W. (n.d.). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)* Surabaya.
- Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (n.d.). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA*.
- Kumalasari, D. (n.d.). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)* Surabaya.
- Masda Masruroh, I., Muchsin, S., & Administrasi Publik, J. (2022). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu)* (Vol. 16, Issue 2).
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>

- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Program, S., Akuntansi, S., & Ekonomi, F. (2021). IMPLEMENTASI ISAK 35 (NIR LABA) PADA ORGANISASI NON LABA (MASJID, SEKOLAH, KURSUS). In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* (Vol. 6, Issue 2)
- Rizqillah, W. A., & Alim, M. N. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Objek Kebun Raya Mangrove terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wonorejo Surabaya. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 4(1), 43–50. <https://doi.org/10.52620/jeis.v4i1.51>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sarwoko, H. (2016). *AGENCY THEORY PERSPECTIVE IN IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE*.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). In *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* (Vol. 2, Issue 1).
- Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (n.d.-a). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). In *Maret* (Vol. 2021, Issue 1).
- Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (n.d.-b). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). In *Maret* (Vol. 2021, Issue 1).
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Zhuhaeny Zhuhaeny, Adriana Madia Marampa, & Stefani Marina Palimbong. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Pinus Buntudatu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 90–101. <https://doi.org/10.59024/semnas.v2i1.149>.